

Buletin

Kabar Desa

Vol. 3



M. SYIRAJUDIN
PIMPIN DPMPD KALTIM
MAJUKAN DESA KALTIM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT, saat ini telah terbit buletin yaitu KABAR DESA, Sajikan Seluk Beluk Kabar Tentang Desa.

Kami mengharapkan melalui buletin ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan informasi dan komunikasi dengan seluruh Penggiat Desa dimanapun berada, khususnya untuk 841 Desa di Kalimantan Timur, sekaligus sebagai sarana komunikasi atau media untuk mendukung Penyebaran Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Dewan redaksi mengucapkan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh Pegawai DPMPD Prov. Kaltim atas kontribusi yang besar sehingga buletin ini dapat terbit 3 bulan sekali

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada penulis yang telah berpartisipasi memberi kontribusi berupa berita yang termuat di www.dpmpd.kaltimprov.go.id

Akhir kata sebagai harapan kami, artikel dalam Buletin ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca dan segala kritik maupun saran untuk pengembangan dan kesempurnaan Buletin ini



H. M. Syirajudin,SH,MT
Kepala DPMPD Kaltim

SECARA NASIONAL IDM KALTIM UNGGULI SULAWESI, MALUKU, DAN KALIMANTAN

SAMARINDA -- Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kaltim tahun 2020 ini menunjukkan hasil menggemblirakan. Pada tingkat nasional, peringkat IDM Kaltim tahun ini berada di peringkat 9.

"Alhamdulillah Kaltim bisa mengalahkan seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Provinsi di Sumatera yang di atas Kaltim hanya Sumbar dan Babel. Bahkan, Provinsi Banten jauh di bawah Kaltim, " ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Selasa (7/7) malam.

Semoga, sambung Jauhar tahun depan bisa lebih baik lagi dari posisi yang cukup bagus saat ini. Tinggal janji memberikan bantuan keuangan desa dari provinsi yang belum terealisasi dan semoga bisa segera terwujud.

Untuk diketahui, pendataan dan input status desa di Kaltim tahun ini sudah tuntas, per tanggal 6 Juli 2020.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, laju kenaikan status desa sesuai katagori mandiri dan maju cukup pesat. Begitu juga penurunan status desa tertinggal dan sangat tertinggal juga cukup besar.

Pada tahun 2019, jumlah desa mandiri di Kaltim hanya 11 desa. Tahun ini mengalami kenaikan menjadi 51 atau naik sebesar 363,63 persen.

Desa maju tahun 2019 lalu berjumlah 107 desa. Tahun ini menjadi 202 desa atau naik sebesar 88,79 persen.

Desa berkembang pada tahun 2019 sebanyak 415. Tahun 2020 ini naik menjadi 456 desa, atau naik sebesar 9,88 persen.

Sedangkan desa tertinggal pada tahun lalu sebanyak 285 desa. Tahun ini sudah turun menjadi 129 desa atau mengalami penurunan sebesar 54,74 persen.

Adapun desa sangat tertinggal yang tahun lalu masih sebanyak 23 desa.

Tahun ini tinggal 4 desa. Jadi mengalami penurunan sebesar 82,61 persen.

"Secara keseluruhan pada tahun 2019 lalu jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal masih sebanyak 308 desa (36,67 persen) dari 841 desa di Kaltim. Tahun ini tinggal 133 desa (15,80 persen), " pungkasnya.

PESERTA KKN KLB DIHARAP MAMPU SEBARKAN SEMANGAT MEMBANGUN DAERAH MASYARAKAT

SAMARINDA -- Sebanyak 2.489 orang peserta Kuliah Kerja Nyata Kondisi Luar Biasa (KKN KLB) Angkatan 46 Universitas Mulawarman Samarinda dilepas.

Para mahasiswa yang akan melaksanakan pengabdian selama dua bulan mulai Juli - Agustus ini diserahkan Wakil Rektor Universitas Mulawarman Samarinda, Profesor Mustofa Agung Sardjono kepada Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekorov Kaltim, Moh Jauhar Efendi mewakili Gubernur Kaltim untuk kemudian diserahkan ke bupati/walikota se Kaltim secara virtual dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (8/7)

Mereka akan disebar di 280 desa dari 841 desa se Kaltim dan di 174 kelurahan dari 197 kelurahan se Kaltim, di 79 kecamatan 193 se Kaltim

Dalam sambutan yang disampaikan Jauhar, gubernur berharap kepada mahasiswa untuk turut serta bersikap, serta mampu menyebarkan semangat membangun daerah di tengah masyarakat. "Ambil sebesar-besarnya hati dan simpati masyarakat sampaikan bahwa masa depan Kaltim akan maju dan berkembang jika kita semua bersatu, semangat, dan bekerja keras," serunya.

Kepada Kepala daerah kabupaten/kota yang menjadi tempat KKN, ia berharap agar menyambut dan memfasilitasi peserta KKN dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, KKN sebagai cara mahasiswa untuk aktualisasi ilmu dan peran serta memberikan pengabdian secara langsung di tengah-tengah masyarakat.

Karenanya ia mengaku bangga bahwa proses KKN akan dimulai lagi oleh mahasiswa Unmul angkatan 46 di tahun 2020 dengan harapan bahwa proses KKN memberikan manfaat baik kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa itu sendiri.

Di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini memasuki era new normal, ia berpesan kepada Civitas Akademika Universitas Mulawarman untuk turut andil dan berperan bersama-sama pemerintah daerah dalam penanggulangan wabah serta dampak yang ditimbulkan.

Untuk itu yang mengajak kepada seluruh mahasiswa agar benar-benar memanfaatkan waktu KKN untuk berbuat hal strategis, cerdas, dan berdayaguna. Bukan hanya membuat nama jalan, tapi lebih dari itu KKN bagi mahasiswa adalah mendapatkan penghayatan tentang manfaat ilmu teknologi dan seni bagi pelaksanaan pembangunan.

KKN juga mengajarkan keterampilan dalam merumuskan serta memecahkan persoalan yang bersifat cross sektoral secara pragmatis ilmiah dengan pendekatan interdisipliner, di samping bermanfaat untuk tumbuhnya rasa kepedulian sosial dan rasa kesejawatan.

"Provinsi Kaltim saat ini menjadi sorotan sejak ditetapkannya sebagai calon ibukota negara yang baru. Saya yakin ini adalah kebijakan yang bukan saja untuk kebaikan Kaltim namun untuk kebaikan bangsa dan negara, Ujar Jauhar

Sementara Wakil Rektor Unmul Samarinda Bidang Akademik, Profesor Mustofa Agung Sardjono KKN dihadapkan situasi yg tidak pernah diduga, karenanya sejak Maret awal mewabahnya COVID-19 LP2M bekerja keras mendesain KKN secara dari dalam Kondisi Luar Biasa (KLB).

"Tapi diupayakan tidak mengurangi ruh KKN. Diharap tetap bisa berikan manfaat optimal bagi masyarakat, " katanya

Pada kesempatan itu dia juga mengapresiasi dukungan DPMPD dalam persiapan pelaksanaan KKN dari tahun ke tahun, termasuk KKN KLB ini.

Nampak hadir Sekretaris DPMPD Kaltim Surono, Kabid Pemdeskel Noor Fathoni, Kabid UEM, SDA, dan TTG Elvis, Kabag Kehumasan Andik Riyanto, dan jajaran LP2M Unmul Samarinda



M SIRADJUDIN PIMPIN DPMPD KALTIM MAJUKAN DESA KALTIM

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim termasuk salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional ahli utama yang dirotasi menempati jabatan baru bersama 12 pejabat lainnya.

Dikatakan Siradjudin, dia akan banyak belajar dengan Kepala DPMPD Kaltim sebelumnya terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

IDM Kaltim tahun 2020 berada pada posisi peringkat sembilan besar secara nasional. Kaltim bisa mengalahkan seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Provinsi di Sumatera yang di atas Kaltim hanya Sumbar dan Babel. Bahkan, Provinsi Banten jauh di bawah Kaltim.



Kepala DPMPD Kaltim yang sebelumnya dipimpin Moh Jauhar Efendi beralih estapet kepemimpinan digantikan M Siradjudin yang sebelumnya menjabat Kepala Dispora Kaltim. Sementara Moh Jauhar Efendi dilantik menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim setelah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) selama sekitar sembilan bulan

“Utamanya merealisasikan rencana strategis (renstra) DPMPD Kaltim 2019-2023 dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kaltim Berani Untuk Kaltim Berdaulat,” sebutnya.

Sementara Moh Jauhar Efendi mengaku lega meninggalkan DPMPD dengan posisi capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim yang sudah bagus. Mengingat hasil pendataan dan input status desa di Kaltim sudah tuntas per tanggal 6 Juli 2020.

“Tinggal janji kita yang memberikan bantuan keuangan desa yang belum terealisasi. Semoga Kepala DPMPD Kaltim yang baru bisa segera merealisasikan sebagai implemmentasi amanat UU,” katanya

SYIRAJUDIN PIMPIN RAPAT PERDANA PEJABAT STRUKTURAL DPMPD KALTIM

SAMARINDA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Syirajudin memimpin rapat perdana bersama pejabat struktural di lingkungan DPMPD Kaltim, di Ruang Rapat Kantor DPMPD Kaltim, Selasa (12/7).

Dikatakan M Syirajudin, rapat bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan antar pejabat struktural untuk saling mengenal dan mengetahui tupoksi masing-masing.

"Kita ingin melihat capaian kinerja setiap pejabat, sebagai ajang latihan menghadapi tatanan hidup baru normal produktif dan aman COVID-19," ujar M Syirajudin yang akrab disapa Iyad.

Melalui rapat diharap dibahas bersama capaian dan kendala pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020. Didiskusikan program kegiatan mana yang perlukan

Dan diharapkan ada penyampaian laporan tertulis dari sekretaris dan masing-masing bidang sebagai bahan pembelajarannya..



Dia yakin dengan kekompakan DPMPD dapat mencapai target rencana strategis (renstra) sejalan dengan Visi Pembangunan "Berani Untuk Kaltim Berdaulat" Dalam RPJMD Kaltim 2019-2023.

Pesan penting yang diingatkannya saat serah terima jabatan Kepala DPMPD Kaltim bagaimana melanjutkan torehan prestasi yang dicapai

Menurut Plt Kepala Dispora Kaltim ini, ketika diistilahkan seperti dunia olahraga, DPMPD sudah menorehkan tinta emas dalam capaian kinerjanya.

"InsyaAllah ini pesan yang saya ingat. Keberhasilan yang dicapai harus dilanjutkan. Sulit diikuti, tapi dengan bantuan semua dan kebersamaan yakin bisa," yakinnya

Perkenalan dan paparan program diwakili Sekretaris DPMPD Kaltim Surono, Kabid Pemerintahan Desa dan Kelurahan Noor Fathoni, Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Riani Tisnadewi, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis, dan perwakilan Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy oleh Kasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat, Helvin Syahrudin.

Untuk diingat, M Syirajudin menjadi Kepala DPMPD Kaltim sejak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor pada 8 Juli 2020, di Kantor Gubernur Kaltim.

Kemudian dilakukan serah terima jabatan Kepala DPMPD Kaltim dari Moh Jauhar Efendi ke M Syirajudin pada 13 Juli 2020, di Kantor DPMPD Kaltim

DD LAWAN COVID-19 KALTIM CAPAI RP31,748 MILIAR

SAMARINDA -- Dana Desa (DD) lawan COVID-19 dari 840 desa yang tersebar di 81 kecamatan dan 7 kabupaten se Kaltim mencapai Rp31,748 miliar dari total pagu DD tahun 2020 sebesar Rp908,976 miliar

"Alhamdulillah semua desa sudah melaksanakan edaran terkait desa lawan COVID-19. Semua sudah menganggarkan DD lawan COVID-19 dan membentuk tim desa lawan COVID-19," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Syirajudin melalui Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi didampingi Kasi Pembangunan Desa, Isnawati, Kamis (16/7).

Untuk tim desa lawan COVID-19 tercatat semua desa sudah membentuknya dengan jumlah total relawan 27,703 orang. Kecuali Desa Mapulu, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang tidak menganggarkan DD lawan COVID-19 dan membentuk tim desa lawan COVID-19 karena dihadapkan masalah tidak salurnya DD.

Jika dilihat besaran alokasi DD lawan COVID-19 perkabupaten, Kutai Kartanegara paling besar mencapai Rp10,982 miliar dari pagu 193 desa dan 16 kecamatan mencapai Rp187,633 miliar.

Dan Kabupaten Kutai Timur Rp6,467 miliar dari 139 desa yang tersebar di 18 kecamatan dengan total pagu DD Rp184,445 miliar.

Aksi yang sudah dilakukan relawan mulai dari Pendirian 700 Pos Tim Relawan Desa Lawan COVID-19, Pendirian 208 tempat isolasi, 780 kali sosialisasi hidup sehat lawan COVID-19, penyediaan 703 tempat cuci tangan di tempat-tempat publik, 780 kali penyemprotan disinfektan, 476 kegiatan pendataan Pemudik /Pendatang, 367 kegiatan pendataan masyarakat rentan sakit, dan 331 kegiatan pengadaan masker bagi warga.

Untuk diketahui, pembentukan tim desa lawan COVID-19 dan anggaran DD lawan COVID-19 merupakan amanat Surat Edaran Mendes PDTT No8/2020 tentang desa lawan COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa.

Kemudian diikuti terbitnya Surat Edaran Mendes PDTT No11/2020 tentang prioritas penggunaan DD 2020 untuk desa tanggap COVID-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Padat Karya Tunai Desa.

PASER DAN KUKAR STATUS KUNING PENCAIRAN DD 2020



SAMARINDA – Progres pencairan Dana Desa tahun 2020 terpantau masih belum optimal. Presentase keseluruhan pencairannya masih diposisi 53 persen atau status merah. Dari 841 desa yang tersebar di 81 kecamatan dan 7 kabupaten se Kaltim, baru 840 desa cair tahap I dan 450 desa cair tahap II.

“Jika dilihat per kabupaten, baru Paser dan Kutai Kartanegara (Kukar) berstatus kuning progres pencairan DD tahun 2020 dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing masing 77,7 persen dan 70,8 persen. Selebihnya lima kabupaten lainnya masih status merah atau persentase 50 persen ke bawah,”sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, H Muhammad Syirajudin melalui Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaaan (PDKP), Riani Tisnadewi didampingi Kasi Pembangunan Desa, Isnawati, Selasa (28/7).

Status kuning dimaksud untuk pencairan DD tahap I dan tahap II. DD kedua kabupaten tersebut seluruhnya sudah salur masing-masing 40 persen tahap I dan 40 persen tahap II dari total pagu DD desa 2020. Hanya tinggal DD tahap III sebesar 20 persen dari total pagu DD yang masih dalam proses pencairan.

Lainnya, seperti Berau pencairan tahap I 99 desa dan tahap II 16 dari 100 desa, Kutai Barat tahap I 190 desa dan tahap II 76 desa dari 100 desa, Kutai Timur tahap I 139 desa dan tahap II 16 desa dari dari 139, Penajam Paser Utara tahap I 30 desa dan tahap II 5 desa dari 30 desa, serta Mahakam Ulu tahap I 50 desa dan tahap II 5 desa dari 50 desa.

Sedangkan untuk penggunaannya hingga 27 Juli 2020, dari total pagu DD 2020 Rp899,887 miliar untuk 841 desa baru digunakan sebesar Rp207,088 miliar atau 23 persen. Rinciannya sebanyak Rp94,780 miliar atau 10,5 persen digunakan untuk sapsras, dan Rp10,897 miliar atau 1,2 persen untuk non sapsras.

Kemudian 11,3 persen untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, yakni Rp2,559 miliar atau 0,3 persen untuk penanggulangan COVID-19 dan Rp98,850 miliar atau 11 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa

PRO AKTIF, DPMPD DORONG 137 DESA SEGERA BENTUK BUMDES



SAMARINDA -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim terkesan pro aktif mendorong desa yang belum membentuk BUMDes untuk segera membentuknya.

Tercatat hingga saat ini terdapat 137 desa sari 841 desa se Kaltim yang belum membentuk BUMDes dengan berbagai permasalahan masing-masing di setiap desa.

"Sesuai arahan pimpinan kita harus tetap bergerak dan memberikan pelayanan publik meskipun sedang bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Karena bidang tugas kami di antaranya bertanggung jawab melakukan pembinaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes, makanya kita coba maksimalkan peran untuk mendorong 137 desa segera membentuk BUMDes, " ujar Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin melalui Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis didampingi Kasi UEM Muriyanto, Selasa (28/7)

Adapun peran yang dilakukan dengan aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten terkait perkembangan data desa yang belum membentuk BUMDes

Mengingat DPMD/DPMK kabupaten pada Juli ini ada kegiatan sosialisasi pembentukan BUMDes di tingkat kecamatan bagi desa-desa yang belum membentuknya

"Makanya kami sekarang monitor yang ke kabupaten untuk dapat info yang update. Apa masih 137 desa yang belum bentuk BUMDes atau sudah berkurang karena sudah membentuk BUMDes, " tampaknya

Sejalan dengan itu, DPMPD Kaltim kemudian terus memperbaharui data desa dan kecamatan yang belum disasar kabupaten. Harapannya saat kegiatan sosialisasi yang direncanakan DPMPD Kaltim disetujui bisa menyasar desa dan kecamatan di maksud.

"Tahun ini ada kegiatan usulan di APBD perubahan. Sosialisasi dan diskusi terkait pembentukan BUMDes di Kabupaten Kutai Timur. Target rencana kerja tahun 2020 ada 5 desa, " sebutnya..

Selain melakukan sosialisasi dan diskusi, DPMPD Kaltim juga terus menginventarisir permasalahan dan kendala pembentukan BUMDes untuk penyelesaian masalah

Lain hal seperti kampung-kampung di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang permasalahan terbesarnya lebih diakibatkan minimnya jumlah penduduk perdesa.

"Mau didorong seperti apa juga kalau penduduknya sedikit susah cari SDM yang mau jadi pengelola BUMDes. Mereka lebih memilih kerja di perusahaan," imbuhnya.

Meski begitu, dia mengaku akan terus mendorong agar desa segera membentuk BUMDes sebagai salah satu usaha bersama masyarakat desa dalam menggerakkan perekonomian desa

DPMPD KALTIM LEVEL BIRU REALISASI ANGGARAN SEMESTER I



SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjadi salah satu peserta Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Rapim TEPR) yang dipimpin Gubernur Kaltim, Isran Noor secara virtual, Rabu (5/8).

DPMPD Kaltim bersama segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim mendengarkan arahan Gubernur Isran terkait realisasi anggaran APBD Kaltim tahun 2020 hingga semester I. Termasuk beberapa OPD diminta klarifikasi realisasi anggaran yang masih belum mencapai target.

Dari DPMPD Kaltim langsung dihadiri Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin didampingi Sekretaris Surono, dan Kasub Rengram Nazly. Nampak hadir Kasub Rengram Dispora Budi Mulatman dan Analis Pengembangan Saprass Dispora Kaltim Ahmad Juanda ikut mendampingi H Muhammad Syirajudin yang juga menjabat Plt Kepala Dispora Kaltim.

Terkait realisasi anggaran semester I 2020 berdasarkan TEPR, DPMPD Kaltim masuk kategori biru dengan persentase antara 49,01 - 100 persen bersama 19 OPD Kaltim lainnya atau hanya ada 20 OPD. Pun demikian berdasarkan SIMDA Keuangan realisasi DPMPD Kaltim juga berada diposisi biru dengan persentase antara 49.01 - 100 persen bersama 11 OPD Kaltim lainnya atau hanya ada 12 OPD.

Iyad sapaan akrab H Muhammad Syirajudin mengaku bersyukur dengan capaian realisasi anggaran yang sudah dilakukan. Menunjukkan program kegiatan yang sudah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2020 sudah terlaksana sesuai target.

“Karenanya kegiatan yang masih belum terlaksana silahkan on the track atau dilaksanakan sesuai target. Hanya saja jika kegiatan tersebut melibatkan orang banyak harus diatur sedemikian rupa mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19,” katanya

GEBRAK MASKER KALTIM RANGKING DUA JUMLAH TERBANYAK SE INDONESIA

SAMARINDA – Pelaksanaan Gerakan Bersama Pakai Masker (Gebrak Masker) tingkat Provinsi Kaltim dengan jumlah total 184.198 masker yang dibagikan terbilang terbanyak jika dibandingkan dengan di Provinsi lain di Indonesia.

“Alhamdulillah, Kaltim ranking dua dalam jumlah Gebrak Masker yang dibagikan kepada masyarakat setelah Kepulauan Riau rangking satu dengan jumlah 1.020.000 masker dari total Gebrak Masker se Indonesia yang mencapai 1.753.558 masker,”sebut Ketua Panitia HUT ke 75 Kemerdekaan RI Tingkat Provinsi Kaltim, Moh Jauhar Efendi, Senin (17/8)

Menurutnya banyaknya jumlah masker yang dibagikan kepada masyarakat tersebut merupakan komitmen dan kepedulian Pemprov Kaltim dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kaltim.



Itu merupakan bantuan Pemprov Kaltim yang dihimpun dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim, termasuk organisasi profesi seperti Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongrajaan (IKA PTK) yang menerjunkan relawannya menyerahkan bantuan masker langsung ke masyarakat.

Bantuan masker mencapai 184.198 masker medis dan masker kain dimaksud dari Dinas Kesehatan 100.000 ribu lembar, BPBD Kaltim 70.000 lembar, DPMPD Kaltim 3.000 lembar, Disperindagkop dan UMKM Kaltim 1.000 lembar, dan Dinsos Kaltim 198 lembara

Sedangkan pembagiannya melibatkan relawan IKA PTK Kaltim yang tersebar diseluruh kabupaten/kota Kaltim dan kader PKK di 10 kabupaten/kota se Kaltim. Rincian pembagiannya Balikpapan 35.200 lembar, Kutai Kartanegara 30.700 lembar, Paser 13.600 lembar, Berau 7.400 lembar, Kutai Timur 11.500 lembar, Bontang 5.320 lembar, Kutai Barat 9.100 lembar, Mahakam Ulu 2.800 lembar, dan provinsi 9.238 lembar.

Lebih lanjut, Jauhar yang juga Ketua IKP PTK Kaltim ini menyebut kerjasama keterlibatan IKA PTK dalam Gerbak Masker merupakan tindak lanjut kerjasama TP PKK Pusat dengan DPN IKA PTK dan diikuti kerjasama di tingkat daerah

SYIRAJUDIN : PEMPROV DUKUNG PENUH PELAKSANAAN KKN TEMATIK COVID-19

SAMARINDA – Pemprov Kaltim disebut siap memberikan dukungan terkait pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik COVID-19 program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang dilaksanakan, 17 Agustus – 17 September 2020, di Provinsi Kaltim

“Pemprov dukung penuh pelaksanaan KKN tematik COVID-19. Atas nama pemerintah provinsi, kita sangat mendukung dan menyambut baik pelaksanaannya di 21 desa dan kelurahan tempatan di Kaltim,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, H Muhammad Syirajudin



Dia menyebut, terdapat 250 mahasiswa Unmul Samarinda yang mengikuti KKN Tematik tersebut. Pelaksanaannya dibagi dalam 23 kelompok untuk 23 desa/kelurahan, yakni 21 kelompok di wilayah Kaltim, 1 kelompok di wilayah Kaltara, dan 1 kelompok di Majene.

Karenanya diharapkan mahasiswa peserta KKN Tematik sebelum turun melaksanakan pengabdian masyarakat diberikan pembekalan terkait COVID-19. Sebab permasalahan antar desa/kelurahan dalam penanganan COVID-19 berbeda, sehingga juga perlu penanganan berbeda.

Pun demikian dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa/kelurahan. Prilaku masyarakat di perkotaan tentu berbeda dengan di desa sehingga pendekatannya juga harus disesuaikan.

“Terlebih pelaksanaannya dilakukan secara daring, tentu pendekatannya juga harus menyesuaikan. Dan tentunya harus mahasiswa yang menguasai Teknologi Informasi (TI). Kemudian lokasi tempatan juga harus yang dilengkapi akses jaringan internet baik,” timpalnya

PEMROV DUKUNG USULAN KEGIATAN PENERAPAN TTG KEMBANGKAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

SAMARINDA -- Pemrov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dipastikan siap mendukung usulan kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) ke masyarakat yang diusulkan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) RI.

“Secara prinsip kita sangat mendukung, karena kegiatan tersebut sejalan dengan Visi Misi Pembangunan Kaltim 2019-2023. Khususnya misi kesatu dan kedua, yakni berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdayasaing terutama perempuan, pemuda, dan disabilitas, serta berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berdaulat memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan,” kata Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin saat menerima jajaran Unmul Samarinda, di ruang kerjanya, Kamis (6/8).



Menurutnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diusulkan tersebut merupakan dukungan Unmul terhadap pengembangan SDM, khususnya daya saing perempuan dan pemuda. Sebab dua kegiatan tambahan yang diusulkan Unmul menasar kalangan perempuan dan pemuda desa.

Menurutnya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diusulkan tersebut merupakan dukungan Unmul terhadap pengembangan SDM, khususnya daya saing perempuan dan pemuda. Sebab dua kegiatan tambahan yang diusulkan Unmul menasar kalangan perempuan dan pemuda desa.

Adapun kegiatan yang diusulkan penerapan TTG ke masyarakat untuk pengolahan produk turunan kelapa menjadi minyak kelapa dan virgin coconut oil di Biduk Biduk, Berau dan pengolahan enau menjadi gula aren di Kedang Ipil, Kutai Kartanegara.

Sebelumnya kegiatan yang diusulkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perikanan masyarakat di Talisayan, Berau. “Kalau ini sudah proses. Hanya tinggal pencairannya berupa hibah alat yang diserahkan untuk masyarakat setempat beserta pembekalan teknis operasionalnya,” sebutnya.

Sementara dua kegiatan tambahan ini baru akan diusulkan di APBN perubahan melalui Kemenristek DIKTI RI. Tidak hanya berupa bantuan alat, tapi juga pendampingan untuk proses pengemasan, pebelan, hingga proses kelayakan dan keamanan produk di BPOM.

DPMPD KALTIM TINJAU PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN 11 DESA PERSIAPAN JADI DEFINITIF DI KUTIM



KUTIM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim turun lapangan untuk meninjau perkembangan pembentukan 11 desa persiapan menjadi desa definitif di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Kunjungan lapangan ini dipimpin Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin bersama jajaran Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Pemdeskel). Diawali koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Pemerintah Setkab Kutim, Joko Suropto, Kamis (27/8).

Dikatakan H Muhammad Syirajudin, berdasarkan informasi yang disampaikan Bagian Pemerintahan Pemkab Kutim draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan 11 desa persiapan menjadi desa definitif sudah rampung.

“Posisinya Draf Raperda usulan 11 desa persiapan tersebut telah diserahkan Bagian Hukum Setkab Kutim untuk difinalisasi sebelum dibawa ke DPRD,” kata Iyad sapaan akrab H Muhammad Syirajudin.

Dia berharap proses pengusulan 11 desa baru dimaksud berjalan sesuai target, yakni bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Sementara Joko Suropto menyebut karena Draf Raperda tersebut sudah diserahkan ke Bagian Hukum, maka selanjutnya mekanisme ada Bagian Hukum yang akan melanjutkan ke DPRD Kutim, untuk nantinya dibahas oleh Pansus Raperda.

Pemkab Kutim belum lama ini telah melakukan persiapan pembentukan desa baru dengan menjadikan desa persiapan. 11 Desa yang bakal dibentuk yakni Desa persiapan Jabdan Kecamatan Muara Wahau, Desa Pinang Raya Kecamatan Sangatta Selatan, dan Desa Bukit Pandan Jaya Kecamatan Teluk Pandan.

Kemudian di Bengalon ada Desa Sekurau Atas, Desa Tepian Raya, Desa Tepian Budaya, dan Desa Tepian Madani. Di Kongbeng ada Desa Miau Baru Utara sedangkan Desa Muara Bengkal yakni persiapan Parianum, Desa persiapan Kerayaan Bilas Kecamatan Sangkulirang, Desa persiapan Kelinjau Tengah Kecamatan Muara Ancalon.

Kepala DPMPD Kaltim, H Muhammad Syirajudin melakukan kunjungan didampingi Kabid Pemdeskel Kasmawati bersama para Kasi Bidang Pemdeskel Dakwan Diny, Vincentius Samadi Ponce Putro, dan Abdul Rivai

EMPAT HAL PENTING INI DIINGATKAN SYIRAJUDIN JIKA INGIN AMAN MEMBANGUN DESA

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, HM Syirajudin mengingatkan empat hal penting yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan dalam membangun desa dengan aman.

**“Seperti yang diingatkan aparat penegak hukum baik Wakajati Kaltim, Supardi maupun Direskrim Polda Kaltim, Kompol Subagyo pada sesi diskusi dialog interkatif Kiprah Desa Virtual 2020, dalam menggunakan anggaran pembangunan desa harus mematuhi aturan yang sudah menjadi koridor dalam UU,”
ujar Iyad sapaan HM Syirajudin**



saat memberikan kata kunci sebelum menutup Dialog Interaktif Kiprah Desa Virtual 2020, di Aula Dispora Kaltim, Senin (7/9

Selanjutnya, jika ada ketidakfahaman baik penggunaan dana desa maupun hal teknis disarankan bertanya kepada pihak yang menguasai agar tidak menyalahi aturan. Jangan sampai, kata dia, tidak faham tapi berpura-pura faham sehingga berpotensi terjadi kesalahan atau bahkan penyimpangan.

Kemudian dalam melaksanakan pembangunan desa harus ada target. Sebab penggunaan anggaran pembangunan desa, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dibatasi oleh waktu sesuai peraturan tentang prioritas penggunaannya pada setiap tahun anggaran.

“Terakhir, dalam membangun desa harus fokus agar apa yang menjadi target prioritas bisa terpenuhi. Semoga ini bisa menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan untuk pembangunan desa lebih baik kedepan, sehingga Indeks Desa Membangun (IDM) Kaltim terus meningkat berkat keberhasilan pembangunan desa,”sebutnya.

Lebih lanjut, IDM merupakan suatu indeks yang digunakan sebagai data dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pengentasan desa sangat tertinggal menjadi desa mandiri. Kaltim dengan 841 desa pada tahun 2018 masih didominasi desa sangat tertinggal yaitu sebanyak 137 desa dan desa tertinggal sebanyak 381 desa

Merespon hal tersebut, dalam RPJMD Kaltim 2019-2020 DPMPD menetapkan target meningkatkan IDM pada 150 desa dari 518 Sangat Tertinggal dan Tertinggal Kaltim menjadi desa berkembang yang berlokasi di tujuh Kabupaten se Kaltim.

Target 150 desa tersebut telah dijabarkan selama 5 tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2019 sebanyak 15 desa, tahun 2020 sebanyak 25 desa, tahun 2021 sebanyak 30 desa, tahun 2022 sebanyak 35 desa dan tahun 2023 sebanyak 45 desa.

Ini sejalan Misi Kedua RPJMD 2019 – 2023 “Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan”. Kemudian target tersebut diwujudkan melalui 4 Program Prioritas yaitu 1) Program Pembangunan lembaga ekonomi perdesaan, 2) Program Pembangunan Desa dan Kawasan, 3) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan 4) Program Kampung Iklim.



Sementara Asisten I Sekprov Berau, Datu Kesuma yang mengikuti Kiprah Desa Virtual 2020 dari Kampung Maluang, Gunung Tabur, Berau mengapresiasi dukungan semua pihak terhadap pelaksanaan pembangunan desa/kampung.

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari peran pembinaan Pemprov Kaltim, khususnya DPMPD Kaltim. Juga termasuk SIGAP dengan program Pejuang SIGAP Sejahtera.

“Hasilnya perkembangan desa di Berau berkembang cukup pesat. Bahkan 2020 tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dari 100 kampung di Berau 61 berstatus bekembang, 30 maju, dan 8 mandiri,”sebutnya didampingi jajaran DPMK Berau, perangkat Kampung Maluang, dan kepala kampung beserta Badan Pemusyawaratan Kampung se Kecamatan Gunung Tabur.

Terkait Kiprah Desa, Ketua Panitia Surono mengatakan kegiatan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan Pemprov Kaltim dan Pemkab Berau dalam implementasi UU No6/2014 tentang desa dan pengawalan bersama terhadap pelaksanaan dana desa.

“Sasaran kegiatan ini terselenggaranya implemmentasi dana desa 2020 yang minim dari permasalahan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan secara tepat waktu,”katanya

Dialog Interaktif Kiprah Desa Virtual menghadirkan narasumber Kepala DPMPD Kaltim HM Syirajudin, Wakajati Kaltim Supardi, Auditor Madya BPKP Kaltim Muksin, Irban Inspektorat Kaltim Gozali Rahman, serta Direskrim Polda Kaltim Kopol Subagio dengan dipandu Moderator dari TVRI Kaltim I Made Kertayasa.



Nampak hadir pejabat struktural di lingkungan DPMPD Kaltim hadir dari Aula Dispora dan jajaran DPMK Berau beserta kepala kampung dan badan pemusyawaratan kampung se Kecamatan Gunung Tabur dan enam kepala kampung dan badan pemusyawaratan kampung target sasaran peningkatan kualitas IDM Kaltim 2019 dan 2020 dari Aula Kantor Kampung Maluang



DPMPD KALTIM – KPW FGD RAKOR DAN EVALUASI P3MD SECARA VIRTUAL

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) Kaltim melaksanakan Focus Group Discussions (FGD) Virtual dalam rangka rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tahun anggaran 2020 di Provinsi Kaltim

Dikatakan Kepala DPMPD Kaltim, HM Syirajudin koordinasi dan evaluasi seperti ini sangat dibutuhkan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan P3MD di Provinsi Kaltim.

Dia menilai permasalahan pelaksanaan P3MD bersifat dinamis, sehingga butuh koordinasi intens secara berjenjang antar pihak terkait pelaksanaannya seperti KPW dan tenaga pendamping profesional di lapangan.



“Semua harus dikoordinasikan. Jangan sampai permasalahan di lapangan terakumulasi sehingga sulit untuk diatasi. Bila perlu ada catatan harian, mingguan, dan bulanan terkait permasalahan dan kendala dalam rangka koordinasi untuk mencari solusi di lapangan,” kata HM Syirajudin saat FGD Virtual DPMPD Kaltim – KPW Kaltim, Selasa (8/9).

Bila perlu, kata dia, DPMPD bersama KPW bisa turun lapangan bersama ketika dijumpai masalah yang perlu penanganan cepat, sehingga bisa kroscek langsung dan tidak hanya menerima laporan di atas kertas.

Dia mengaku kinerja pendampingan pelaksanaan P3MD yang dilakukan DPMPD sebagai Satker P3MD tidak bisa dilakukan sendiri. Butuh dukungan pihak luar DPMPD seperti KPW dan Tenaga Pendamping Profesional.

Capaian keberhasilan lonjakan peringkat Indek Desa Membangun (IDM) Kaltim dari awalnya peringkat 23 secara nasional pada 2016 menjadi peringkat 9 secara nasional pada 2020.

“Tentu lompatan luar biasa ini berkat kerjasama, koordinasi, dan dukungan semua termasuk KPW dan pendamping,”katanya.

Sependapat dengan itu, Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi mengaku sepakat bahwa dalam menuntaskan pelaksanaan P3MD perlu bersinergi. Karenanya dia berharap sinergisitas antara DPMPD – KPW yang sudah terjalin tetap dilakukan dengan baik.

“Selama ini sudah terjalin baik hubungan DPMPD - KPW. Bagaimana meneruskan kedepan dan memperbaharui semangat membangun desa. Terpenting perlu diskusi penyelesaian kendala di lapangan,” sebutnya.

Lantas KPW Kaltim, Asnawi mengaku bukan perkara gampang mempertahankan peringkat 9 nasional IDM Kaltim, karena semua provinsi pasti berlomba melakukan perbaikan. “Makanya harus duduk bareng membedang langsung IDM. Perlu forum khusus membahas indicator-indikator penilaian yang harus dilakukan pendampingan,”katanya.

Tidak gampang bertahan di peringkat 9 nasional. Semua provinsi pasti berlomba. Bisa saja meningkatkan desa mandiri tapi susah tetap. Makanya harus duduk bareng bedah langsung IDM. Perlu forum khusus di masa pandemi ini untuk membahas bersama.

Nampak hadir mengikuti FGD Virtual Kabid Pemdeskel Kasmawati bersama dua kepala seksinya Abdul Rivai, Dakwan Dinyatakan, dan Vincentius Samadi Ponco Putro, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Fathoni, dan Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat, Muriyanto, dan Kasi pada Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Ahmad Nahjani, Esthi Susila Rini, dan Isnawati.



IYAD AJAK TPP DAN DPMD/DPMK SINERGI LAKSANAKAN TUGAS MULIA PENDAMPINGAN

SAMARINDA -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, HM Syirajudin mengajak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung (DPMPD/DPMK) se Kaltim dapat bersinergi dalam melakukan tugas pendampingan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Dia menilai peran pendampingan merupakan tugas mulia, sehingga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk hasil terbaik.

"Mohon dukungannya. Kita harus bersinergi dalam melaksanakan tugas mulia ini. Apalagi di suasana pandemi COVID -19 seperti sekarang yang menjadikan semuanya serba terbatas, " ujar Kepala DPMPD Kaltim, HM Syirajudin yang akrab disapa Iyad saat membuka focus group discussion (FGD) virtual bersama TPP dan DPMD/DPMK se Kaltim, Kamis (10/9).

Melalui forum silaturahmi dan perkenalan ini dia ingin menyemangati TPP dan DPMD/DPMK agar semangat bekerja melayani masyarakat melakukan pendampingan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dia juga ingin dengar masalah dan kendala dihadapi dalam penyaluran Dana Desa. "Misal di Berau ada 49 desa yg pencairan tahap II nya terlambat. Ingin mendengar langkah apa yang dilakukan untuk percepatan mempertimbangkan sisa waktu yang terbatas, " katanya.



Dengan demikian diharapkan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai rencana kerja tindak lanjut kegiatan.

Mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran yang terbilang terbatas hanya sisa tiga bulan kedepan.

Terpenting kata dia, dalam melaksanakan tugas harus bekerja sesuai aturan dan profesional.

Senada dengan itu, Koordinator Pendamping Wilayah (KPW) yang sekarang disebut Tenaga Ahli Provinsi, Alwani mengaku beryukur dilaksanakan FGD secara virtual.

Melalui FGD dianggap membuka ruang para pihak terkait pelaksanaan P3MD saling diskusi penyelesaian berbagai kendala dalam upaya percepatan.

"Mudahan bisa terus dilakukan untuk umpan balik mengikuti perkembangan progres se Kaltim,

Pada kesempatan itu, Alwani mengaku bersama TA Provinsi lainnya akan menyusun tim kecil bersama TPP dan Satker P3MD melakukan pengkajian dan telaahan indikator Indeks Desa Membangun (IDM).

Hasilnya menjadi buku saku IDM yang bisa jadi masukan perencanaan pembangunan desa. Dijadikan prioritas perencanaan pembangunan untuk penyelesaian permasalahannya, sehingga yang menjadi indikator penilaian IDM bisa ditingkatkan mendongkrak peningkatan status IDM desa.

"Di bawa melalui forum musrenbangdes untuk merencanakan pembangunan desa mendorong peningkatan status IDM desanya," serunya.



Pelaksanaannya FGD Virtual sendiri dibagi dua tahap. Sesi pertama pada pagi tadi bersama empat kabupaten, yakni Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Dan sesi dua siang ini dilanjutkan tiga kabupaten lainnya, yakni Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau

Dari DPMPD Kaltim selain Kepala DPMPD Kaltim HM Syirajudin juga diikuti Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Riani Tisnadewi yang sekaligus menjadi moderator bersama tiga Kepala seksinya Ahmad Nahjani, Esthi Susila Rini, dan Isnawati.

Kemudian Kabid UEM, SDA, dan TTG Elvis bersama Kepala Seksi UEM Muriyanto, serta Kabid Pembedeskel Kasmawati.

DPMPD SIAPKAN DATA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DD 2020

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim menjadi salah satu dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltim yang dihadirkan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

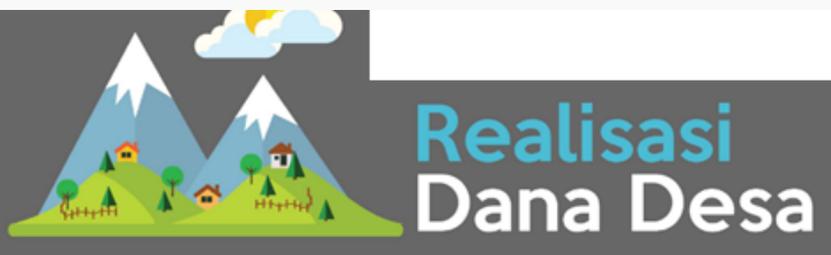
Rakor diikuti Pj Sekprov Kaltim M Sabani didampingi Asisten I sebagai Plt. Kadis Kominfo, Asisten II sebagai Plt DPMPTSP, Kepala BPKAD, Kepala Biro Hukum/Plt. Karo organisasi, Kepala Biro Adbang sebagai yang membawahi layanan pengadaan barang dan jasa, dan Plt. Inspektur dari Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (15/9).

Sementara beberapa Kepala OPD Kaltim seperti Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala BPSDM, Kepala DPMPD, Kepala Disdik, Kepala PUPR, dan Sekwan mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Kepala DPMPD Kaltim, M Syirajudin mengatakan keikutsertaannya dalam rapat karena salah satu dari delapan fokus area pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi di Kaltim terkait tata kelola dana desa.

Meski begitu dia hadir bersama pejabat terkait dengan membawa data progres penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2020.

Terkait progres penyaluran dana desa per 13 September 2020, dari total pagu Rp899,887 miliar untuk 841 desa di 81 kecamatan, 7 kabupaten se Kaltim tercatat yang sudah salur Rp652,221 miliar atau 72,5 persen.



TOTAL :

KALIMANTAN TIMUR
2015 s/d 2019

Rp 3.074.728.525.691



Rp 240.553.308.691,-

Rp 540.759.158.000,-

Rp 692.420.247.000,-

Rp 730.876.230.000,-

Rp 870.119.582.000,-

2015

2016

2017

2018

2019



Rinciannya tahap I sebanyak 840 desa sudah salur senilai Rp358,683 miliar atau 39,9 persen dan tahap II sebanyak 767 desa senilai Rp293,537 miliar atau 32,6 persen. Sedangkan tahap III belum ada desa yang sudah melakukan penyaluran.

Sedangkan untuk penggunaan dana desa, tercatat sebanyak Rp154,516 miliar digunakan untuk saptas, Rp19.915 miliar untuk non saptas, Rp8,677 miliar untuk penanganan COVID-19, dan Rp121,764 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dari total Rp304,872 miliar dana desa yang sudah direalisasikan penggunaannya.

Tidak hanya itu, dia juga menyiapkan data terkait progres penyaluran BLT Desa. Tercatat hingga 13 September 2020 tahap I salur di 833 desa, tahap II 832 desa, tahap III 814 desa, tahap IV 396 desa, tahap V 193 desa, dan tahap VI 62 desa.

“BLT Desa disalurkan ke 61.341 KK penerima. Besarannya tahap I, II, dan III sebesar Rp600 ribu per KK per bulan dan tahap IV, V, VI sebesar Rp300 ribu per KK per bulan. Penyalurannya sebanyak 60.515 dilakukan secara tunai dan 826 dilakukan secara non tunai,” sebutnya merinci.

Data dimaksud diakui sengaja disiapkan agar ketika dipertanyakan KPK bisa disampaikan secara jelas. Sebab dia mengaku progres penyaluran dan penggunaan Dana Desa, termasuk penyaluran BLT desa terus diikuti perkembangannya oleh DPMPD Kaltim selaku Satker P3MD Kaltim.

M Syirajudin mengikuti rapat didampingi Kabid Pemdeskel Kasmawati, Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan diwakili Kasi Pembangunan Desa Isnawati, Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sobudmasy Noor Fathoni, dan Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, SDA, dan Teknologi Tepat Guna Elvis, dan Sekretaris DPMPD diwakili Kasub Keuangan Siti Qomariah

DPMPD KALTIM

TIPS MENCEGAH VIRUS CORONA



PAKAI MASKER



CUCI TANGAN TERATUR



**TUTUP MULUT DENGAN SIKU
JIKA BATUK**



**JANGAN SENTUH WAJAH,
HIDUNG, DAN MATA
TANPA MEMBILAS TANGAN**



**JAGA JARAK DENGAN
ORANG YANG SAKIT**



**BERSIHKAN DENGAN
DESINFEKTAN**





#MulaiDariDesa

Besaran BLT Dana Desa

Besaran BLT-Dana Desa
Rp. 600.000 per bulan
per Keluarga, diberikan
selama 3 Bulan
sejak April 2020

Penyaluran dilakukan
dengan metode
Non-Tunai





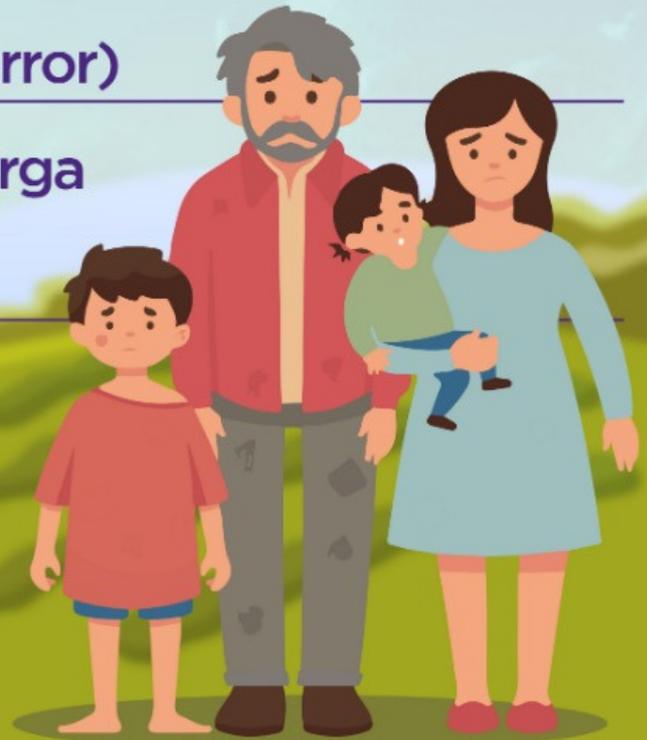
#MulaiDariDesa

Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Keluarga Miskin Non-PKH (Program Keluarga Harapan), Non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Non-Kartu Prakerja dan yang kehilangan mata pencaharian

Belum terdata (exclusion error)

Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis





#MulaiDariDesa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Total
Rp. 22,48 Triliun

Untuk 12,49 juta lebih keluarga miskin
penerima bantuan selama tiga bulan





Kelembagaan
H.M. Syitrajudin, SH, MT
NIP. 19611216 198603 1 014



Kelembagaan
Ir. Surono, M.Si
NIP. 19660119 199903 1 003



Kasubag. Umum dan Kepegawaian
H. Mubtoli Hamid, SE
NIP. 19630715 200112 1 002



Kasubag. Keuangan
Sri Qomariah, SE
NIP. 19660607 198801 2 002



Kasubag. Perencanaan Program
Nuzly, SE
NIP. 19680223 197013 2 003



Kelembagaan
Kelembagaan I
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Kasmawati, S.STP, M.Si
NIP. 19800510 199810 2 002



Kelembagaan
Kelembagaan II
Pembangunan Desa Kawasan Perdeaan
Drs. Riani Tisnadewi, MM
NIP. 19621112 198603 2 011



Kelembagaan
Kelembagaan III
Kelembagaan dan Sosbudmasy.
Drs. Noor Fathoni, M.Si
NIP. 19651212 199703 1 003



Kelembagaan
Kelembagaan IV
UEM dan TIG
Drs. Elvis, M.Si
NIP. 19651221 198609 1 001



Kasi. Kemasyarakatan & Aset Desa
Drs. Dikson Diny
NIP. 19681028 199001 1 010



Kasi. Kemasyarakatan, Kesi. dan Aset Desa
Vincentina Samud Poro Poro, S.STP
NIP. 19810927 200012 1 002



Kasi. Kemasyarakatan, Kesi. dan Aset Desa
Ashli Rizka, Ssis
NIP. 19670426 200012 1 003



Kasi. Pengembangan Informasi Pembangunan
Desa dan Kelurahan
Drs. Ahmad Najhian
NIP. 19661003 198609 1 001



Kasi. Kemasyarakatan
Erthi Sula Rini, SPM
NIP. 19720107 199703 2 004



Kasi. Pembangunan Desa
Jorawan, SPM, Ssi
NIP. 19740124 199703 2 003



Kasi. Pembangunan Komunitas Masyarakat
Helon Sahadudin, S.E, M.Si
NIP. 19710527 199002 1 001



Kasi. Kelembagaan, Manajerial
Huzamah, SP
NIP. 19630312 200012 2 001



Kasi. Kelembagaan, Manajerial
E. Erida Pranomaningrum
NIP. 19650328 199703 2 001



Kasi. Pengembangan SDA dan TIG
Endang Effendi, SDMP
NIP. 19640928 198601 1 001



Kasi. Usaha Ekonomi Masyarakat
Murnanto, S.STP
NIP. 19820315 200112 1 003



Kasi. Pengembangan Sistem Perencanaan TIG
Noor Agustina, ST
NIP. 19790811 200502 2 004

